

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kaum buruh¹ selalu menuntut hak – hak normatifnya berupa upah yang layak diberikan kepada mereka. Selain itu bagi buruh perempuan, hak untuk mendapatkan cuti haid dan hamil mereka serta menolak penggunaan pekerjaan anak - anak. Selain itu pengusaha juga bertindak semena-mena terhadap buruh, seperti PHK dan penganiayaan acap kali terjadi dan juga pelecehan seks. Upah buruh yang rendah, jam kerja yang panjang, banyak perusahaan membuat jam kerja 08.00 pagi sampai dengan jam 18.00 sore ada yang dengan perhitungan lembur tetapi wajib lembur, serta perhitungan lembur yang tidak jelas. Ada yang dipaksa kerja pada hari libur dan minggu, bila tidak kerja di PHK-kan. Ada yang tidak menghitung lembur dan acap kali buruh dianiaya oleh oknum ABRI bila buruh menuntut haknya². Namun semua tuntutan ini tidak dapat terwujud apabila hanya diperjuangkan sendiri saja, dalam kondisi

¹Istilah buruh sendiri masih merupakan bahan perdebatan dari zaman ke zaman. Perdebatan tersebut terkait pada bahasa. Apakah akan mempergunakan istilah buruh atau istilah karyawan yang secara umum sama-sama berarti pekerja. Sistem-sistem seperti bahasa memang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dalam hal ini yang dimaksud dengan buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazimnya disebut majikan) dengan menerima upah dan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan, di bawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dengan pekerja. Lihat Haliti Toha dan Hari Pramono, hubungan kerja antara majikan dan buruh, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 3.

²Rangkuman dari Sharing and Reflexion PBN (Pertemuan Buruh Nasional) bertempat di Hotel Cipayung Bogor, Jawa Barat Pada tanggal 24 - 26 April 1992

tersebut, sangat diperlukan peran penting serikat buruh³ dalam mensejahterakan kaum buruh.

Setiap kurun waktu, gerakan serikat buruh mempunyai persamaan umum di setiap wilayah Indonesia yakni menuntut hak – hak normatif tersebut. Gerakan buruh juga tidak terlepas dari pengaruh iklim perpolitikan Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan metode serikat buruh (kooperatif atau nonkooperatif) besar atau kecil dan berhasil atau gagalnya perjuangan serikat buruh⁴. Masa orde lama gerakan serikat buruh diwarnai dengan perjuangan politik praktis yakni tergabung atau menjadi *underbrow* dari partai politik. Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dengan MASYUMI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) dengan Partai Nahdatul Ulama, Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kuatnya pengaruh politik untuk mempengaruhi metode dan orientasi gerakan serikat buruh sudah terbukti secara historis. Ini terlihat dalam kebijakan pemerintah orde lama yang banyak membubarkan partai politik⁵.

³Yang dimaksud dengan serikat buruh adalah organisasi buruh di luar perusahaan yang didirikan oleh pekerja untuk melindungi atau memperbaiki status ekonomi dan sosialnya melalui perjuangan atau usaha kolektif. Lihat KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 826.

⁴ Soegiro DS dan Edi Cahyono, Gerakan Serikat Buruh: Zaman Kolonial, Hindia Belanda hingga Orde Baru, Makalah tanpa penerbit, 1990 Jakarta, hal 20.

⁵ Beberapa Partai Politik yang dilarang adalah Masyumi dan PSI, ini terjadi pada bulan Agustus 1960. selain partai politik, beberapa tokoh yang dianggap berseberangan dengan Soekarno dijebloskan ke penjara. Diantaranya yaitu, Syarifuddin, Natsir, Simbolon, Burhanuddin, Syahrir, dll. Lihat M.C Ricklefs, Darmono Hardjowidjono, Sejarah Indonesia Modern, Jogjakarta : Gadjah mada University Press, 2005, hal 406 dan 408.

Orde baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis buruh merengang nyawa di tangan para pembunuh.⁶ Orde baru membuka pintu lebar – lebar kepada perusahaan – perusahaan asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek yang kemudian dikelola oleh mitra – mitra dan kerabat dekatnya.

Selain itu, orde baru juga membuat gerakan serikat buruh berorientasi pada ekonomi. Dengan bantuan *Frederick Ebert Stiftung* (FES) disusunlah sebuah konsep baru serikat buruh Indonesia yang akan di dukung oleh orde baru yaitu gerakan serikat buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun, keuangan organisasi tidak boleh tergantung pada pihak luar, kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal – soal sosial ekonomi yakni hubungan industrial. Penataan ulang serikat – serikat buruh yang mengarah pada penyatuan, perombakan pada struktur keserikat buruhan, mengarah pada serikat pekerja untuk masing – masing lapangan pekerjaan⁷.

Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik, orde baru hanya mengijinkan satu wadah serikat buruh. Serikat-serikat buruh independent yang sebelumnya lahir pada masa Orde Lama di bawah pimpinan presiden Soekarno, dipaksa unifikasi ke SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) oleh Menteri Tenaga Kerja eks-militer Sudomo. Kejadian ini yang membuat buruh kecewa terhadap SPSI. Mulailah muncul LSM-LSM perburuhan yang

⁶ Sebagian besar diantara mereka adalah yang tergabung dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Lihat Ibid, hal 9.

⁷ *Frederick Ebert Stiftung* (FES) adalah sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat Jerman yang pro pasar bebas, bekerja sama dengan yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) merekonstruksi gerakan buruh melalui sebuah seminar yang disponsori oleh FES di Jakarta tahun 1971.

mengorganisir dan mengadvokasi buruh. Buruh-buruh yang kecewa banyak melakukan unjuk rasa liar (*wild cat strike*). Kelompok Muchtar Pakpahan, Abdulrahman Wahid, sebagian kecil LSM daerah, setuju memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif. Singkatnya, pada tanggal 22-25 April 1992 diadakan Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung, Bogor. Dihadiri oleh 104 aktifis LSM dan wakil buruh. Pada tanggal 25 April 1992, didirikanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dengan menunjuk Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum⁸.

Deklarasi ini selanjutnya menandai dimulainya sebuah sejarah baru pergerakan awal serikat buruh independen di Indonesia. Deklarasi ini selanjutnya mendapat respon negatif dari pemerintah saat itu. Terbentuknya SBSI, membuat semakin banyak gerakan – gerakan sosial yang terjadi di Indonesia, titik berat gerakan SBSI adalah pembelaan terhadap kaum buruh. Terlebih lagi peristiwa gerakan buruh 14 April 1994 yang terjadi di Medan, SBSI terlibat total didalamnya⁹.

Senada dengan itu, peristiwa lahirnya SBSI pada 25 April 1992 sampai kepada peristiwa gerakan buruh SBSI 14 April 1994 yang terjadi di Medan menjadi salah satu faktor tujuan melakukan penelitian dalam mengkaji gerakan SBSI di Kota Medan. Kota Medan juga patut menjadi salah satu referensi, karena kota Medan termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sejarah penting dalam gerakan sosial buruh di Indonesia.

⁸ (lihat <http://www.ksbsi.org.org>)

⁹ Lihat Harian Kompas, 17 April 1994

Gerakan SBSI juga tidak hanya sebatas kampanye melainkan juga mereka terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kebijakan perburuhan. Seperti dalam kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), SBSI ikut mengambil keputusan yaitu dalam keterlibatannya dalam Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA)¹⁰. Setiap gerakan yang dilakukan SBSI pada dasarnya adalah sebuah perlawanan terhadap kepentingan kaum buruh, sehingga untuk mengubah kebijakan agar dapat berpihak kepada buruh merupakan sebuah peranan yang harus mereka lakukan sebagai salah satu tugas utama dari gerakan sosial. Atas dasar ini juga penulis tertarik untuk melakukan penelitian gerakan buruh yang dilakukan oleh SBSI. Konsep dan strategi gerakan perjuangan SBSI dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan juga perjuangan terhadap Kebijakan Upah Minimum untuk buruh dari tahun 1992 sampai dengan 2012 menjadi warna yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian gerakan sosial buruh yang dilakukan oleh SBSI.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian gerakan yang dilakukan oleh SBSI dengan harapan kita dapat tersadar dan lebih peduli terhadap kaum buruh. Dan juga, penulis tertarik untuk menjadikan SBSI sebagai fokus penelitian terhadap Sejarah gerakan serikat buruh dikota Medan Sumatera Utara. Penelitian yang berjudul **“Sejarah Gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Kota Medan Tahun 1992-2012”** ini diharapkan melahirkan

¹⁰ Hutabarat, H, Tua Dilema Keterlibatan Serikat Buruh dalam Dewan Pengupahan, Tabloid Protes Edisi Januari 2005, hal 18

pemahaman kritis kondisi perjuangan, ketertindasan gerakan serikat buruh di kota Medan, Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang sejarah berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Medan
2. Konsep dan strategi gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) memperjuangkan hak – hak kaum buruh di kota Medan tahun 1992 - 2012
3. Sejarah gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam menentang implementasi kebijakan perburuhan yang tidak sesuai dengan prosedur di kota Medan tahun 1992 - 2012

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis menetapkan batasan penelitian adalah “Sejarah Gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Kota Medan Tahun 1992-2012”.

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan diatas maka secara singkat perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya SBSI di kota Medan?
 2. Bagaimana konsep dan strategi gerakan SBSI dalam memperjuangkan hak – hak kaum buruh di kota Medan tahun 1992 – 2012?
-

3. Bagaimana sejarah gerakan SBSI dalam menentang implementasi kebijakan perburuhan yang tidak sesuai dengan prosedur di kota Medan tahun 1992-2012?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Medan.
2. Untuk mengetahui konsep dan strategi gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam memperjuangkan hak – hak kaum buruh di kota Medan tahun 1992 – 2012.
3. Untuk mengetahui sejarah gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam menentang implementasi kebijakan perburuhan yang tidak sesuai dengan prosedur di kota Medan tahun 1992 – 2012.

F. Manfaat Penelitian

Dengan melihat apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka hasilnya dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus secara:

1. Akademis, penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah lembaga pendidikan dan masyarakat berupa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan langsung dengan gerakan perjuangan serikat buruh di Kota Medan.

2. Praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku gerakan sosial dalam menentang kebijakan kapitalisme khususnya bagi serikat buruh.
3. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam studi gerakan sosial khususnya peranan serikat buruh.
4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir, melalui karya ilmiah dalam penelitian

THE
Character Building
UNIVERSITY